

**KERANGKA ACUAN KERJA
FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DALAM
RANGKA PERSIAPAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NTB MENUJU ZI-WBK**



**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERSIAPAN KANTOR BAHASA PROVINSI NTB MENUJU
ZI-WBK

Kementerian	:	(023)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Negara/Lembaga			
Unit Eselon I	:	(023.13)	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Program	:	(2020.WA)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Hasil	:		Terwujudnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam rangka persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB menuju ZI-WBK
Unit Eselon	:	(660091)	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
IV/Satker			
Kegiatan	:	(2023)	Layanan Umum
Indikator Kinerja	:		Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Kegiatan			
Satuan Ukur	:		Orang
Jenis Keluaran	:	(EBA.962.051.0E)	Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB menuju ZI-WBK
Volume	:		

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Menuju ZI-WBK ini mengacu pada beberapa dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

11. Surat Keterangan Panitia kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan dalam Rangka Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0234/I5.18/LK.06.00/2023 tanggal 30 Januari 2023

2. Gambaran Umum

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan sebelas layanan publik. Layanan tersebut mencakup layanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Penyuluhan Kebahasaan dan Kesastraan, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Aadpatif Merdeka, Ahli Bahasa, Penjurian Lomba Kebahasaan dan Kesastraan, Peminjaman Barang Milik Negara (Bus dan aula), Klinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa), Program Literasi, dan Praktik Kerja Lapangan (Magang). Seluruh layanan tersebut harus memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk mewujudkan standar pelayanan yang maksimal dan representatif, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB menuju ZI-WBK. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menghimpun pendapat, mereviu, menerima masukan, dan mendapatkan kritik, baik dari para pengguna layanan, mitra kerja, maupun dari perwakilan pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian bagian dari internal atas pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga standar pelayanan dapat disusun secara optimal. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka persiapan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ZI-WBK. Dengan adanya kegiatan ini, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara berharap dapat mewujudkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ZI-WBK.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah seluruh elemen dalam Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemberi layanan dan pihak eksternal sebagai pengguna

layanan. Melalui kegiatan ini, akan ditetapkan standar layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat semakin optimal. Selain itu, calon pengguna layanan dari berbagai kalangan juga akan mendapat pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara swakelola oleh panitia yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Menuju ZI-WBK, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan empat tahapan berupa tahap persiapan, pelaksanaan, masa sanggah informasi, dan pelaporan, dan keseluruhan tahapan kegiatan dilaksanakan dalam waktu dua minggu oleh pelaksana kegiatan.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini akan menghasilkan sebuah proposal kegiatan. Proposal kegiatan memberikan gambaran kegiatan, mencakup latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, kepanitiaan, peserta yang terlibat, biaya yang dibutuhkan, serta jadwal yang jelas menyangkut waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Tahap persiapan dilanjutkan dengan melaksanakan koordinasi dengan calon peserta terpilih dan instansi yang menaungi peserta. Seluruh tahap persiapan memerlukan sarana pendukung berupa ATK. Tahap ini dilaksanakan sejak diputuskan SK panitia pada tanggal 30 Januari 2023 hingga 6 Februari 2023. Pada tanggal 3 dan 4 Februari 2023, dilakukan koordinasi kepada pengguna layanan dan mitra kerja serta pengantaran surat. Tahap ini memerlukan biaya belanja perjalanan dinas dalam kota berupa transpor lokal panitia (5 org x 2 kl).

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB Menuju ZI-WBK dalam waktu satu hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023. Seluruh tahap pelaksanaan memerlukan sarana pendukung sebagai berikut.

1. Belanja bahan: kain rentang (1 pkt x 1 keg), ATK (1 pkt x 1 keg), Kudapan peserta (69 org x 1 hr x 2 kl), dan makan siang peserta (69 org x 1 hr x 1 kl)
2. Belanja jasa profesi: (2 org x 2 jam x 1 keg)
3. Perjalanan dinas dalam kota peserta (50 org x 1 hr x 1 keg)

c. Tahap Masa Sanggah Informasi

Pada tahapan ketiga ini, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengunggah file hasil revidi 11 standar pelayanan, Maklumat Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik ke dalam, Berita Acara 11 standar pelayanan, Berita Acara Maklumat Pelayanan Publik, dan Berita Acara Maklumat Pelayanan Informasi Publik ke dalam laman resmi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, publikasi pemberitahuan pada masa sanggah dilakukan melalui media sosial resmi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masa sanggah minimal dilakukan dengan masa 7 hari masa kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada masa sanggah ini, para pengguna layanan diberikan waktu untuk memberikan saran, masukan, dan kritik secara terbuka untuk menyempurnakan kembali standar pelayanan, Maklumat Pelayanan Publik, dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap akhir kegiatan ini, dilakukan pelaporan sebagai pertanggungjawaban panitia atas tugas yang telah dilaksanakan. Pelaporan ini meliputi gambaran pelaksanaan, keluaran kegiatan, kontribusi kegiatan terhadap peserta, tindak lanjut, dan kendala yang dihadapi beserta jalan solusinya. Biaya yang diperlukan adalah penggandaan dan penjiilidan laporan (1 pkt x 1 keg).

**Matriks Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan
Kantor Bahasa Provinsi NTB Menuju ZI-WBK**

Uraian Kegiatan	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Persiapan												
Pelaksanaan												
Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB Menuju ZI-WBK dengan rincian jadwal sebagai berikut.

Jadwal	Kegiatan
30 Januari—2 Februari 2023	Koordinasi panitia
3—4 Februari 2023	Koordinasi panitia dengan peserta dan narasumber
7 Februari 2023	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB Menuju ZI-WBK

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB Menuju ZI-WBK adalah Rp19.970.500,00. Biaya tersebut diperinci dalam rancangan anggaran biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

Mataram, 30 Januari 2023

Mengetahui,

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP. 198103092006042002

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Eselon I
Program
Unit Eselon IV/Satker
Kegiatan
Rincian *Output*
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
Alokasi Dana

Rp 19.970.500

Kode		Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Rincian Belanja																Vol	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah
EBA.962	Layanan Umum																				
051																					
OE	Rapat Persiapan Kantor Bahasa Provinsi NTB menuju ZI-WBK																	Rp	19.970.500		
	Forum Konsultasi Publik																				
521211	Belanja Bahan																	Rp	1.505.500		
	(KKPN.038-Mataram)																				
	-Penggandaan dan penjiilidan	1	pkt	x	1	keg											1	pkt	Rp 500.000		
	-Kain rentang spanduk +kain rentang ttd seluruh peserta	1	pkt	x	1	keg											1	pkt	Rp 500.000		
	ATK	1	pkt	x	1	keg											1	pkt	Rp 500.000		
	Kertas HVS A4	3	rim	x	1	keg											3	rim	Rp 42.000		
	Map kertas	1	lusin	x	1	keg											1	bh	Rp 44.500		
	Staples kecil	1	bh	x	1	keg											1	bh	Rp 22.000		
	Isi staples kecil	2	ktk	x	1	keg											2	ktk	Rp 3.000		
	Binder Klip 115	3	ktk	x	1	keg											3	ktk	Rp 7.000		
	Spidol tanda tangan	2	bh	x	1	keg											2	bh	Rp 15.000		
	Pulpen (untuk keperluan panitia dan penandatanganan BA Layanan)	15	bh	x	1	keg											15	bh	Rp 5.000		
	Masker	1	ktk	x	1	keg											1	ktk	Rp 56.000		
	Tisu Basah	1	bh	x	1	keg											1	bh	Rp 15.000		
	materai Rp10.000 penandatanganan BA 11 layanan	11	buah	x	1	keg											11	buah	Rp 10.000		
	Konsumsi																	Rp	5.865.000		

	Kudapan (50 peserta, Kepala, 5 panitia, 2 narsum, 11 penanggung jawab layanan)	69	ktk	x	2	kali											138	kotak	Rp	18.000	Rp	2.484.000
	Makan siang (50 peserta, Kepala, 5 panitia, 2 narsum, 11 penanggung jawab layanan)	69	ktk	x	1	kali											69	kotak	Rp	49.000	Rp	3.381.000
522151	Belanja Jasa Profesi																					
	- Narasumber (2 orang x 2 jam)	2	org	x	2	jam	x	1	keg								4	OJ	Rp	900.000	Rp	3.600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																					
	- Transpor lokal Peserta (50 orang x 1 hari)	50	org	x	1	kl											50	org	Rp	150.000	Rp	7.500.000
	- Transpor lokal panitia (5 panitia x 2 hari)	5	org	x	2	kl											10	org	Rp	150.000	Rp	1.500.000



Pejabat Pembuat Komitmen,

[Signature]

Diah Rachma Yudita, S.I.P.
NIP 198210152006042001

Mataram, 1 Februari 2023
Koordinator Kegiatan

[Signature]
Baiq Ayu Candra, S.I.Kom.
NIP 199110032014042001